

LAPORANKINERJAINSTANSIPEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan baik untuk, mewujudkan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali


Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermafaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



Ir. CIRTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GRAFIK..... iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

IKHTISAR EKSEKUTIF vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi..... 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi 5

2.2. Perjanjian Kinerja 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 7

3.2. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 8

3.3. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2 13

3.4. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3 16

3.5. Realisasi Anggaran 20

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 26

4.2. Saran 26

4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan 3

Tabel 1.2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 4

Tabel 1.2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural..... 4

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 6

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2024 8

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 8

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8

Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan RPJMD 9

Tabel 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Nasional 9

Tabel 3.2.5 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 1 11

Tabel 3.3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 13

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13

Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan RPJMD 13

Tabel 3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Nasional 14

Tabel 3.3.5 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 2 15

Tabel 3.4.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 16

Tabel 3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 16

Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan RPJMD 16

Tabel 3.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Nasional 16

Tabel 3.4.5 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 3 17

Tabel 3.5.1 Program dan Kegiatan Disperkim Tahun 2024..... 21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1 grafik realisasi indikator kinerja utama sasaran 1 10

Grafik 3.3.1 grafik realisasi indikator kinerja utama sasaran 2 14

Grafik 3.4.1 grafik realisasi indikator kinerja utama sasaran 3 17

DAFTAR GAMBAR

-

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali 2021-2026;
- Lampiran 2 Cascade down IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026;
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Tahun 2024;
- Lampiran 6 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
- Lampiran 7 Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
- Lampiran 8 Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
- Lampiran 9 Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2024;

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dengan tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke 5 (lima) Yaitu Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing dengan sasaran : 1. Meningkatnya akses rumah layak huni, (2) Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness (3) Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah dan IKU : (1) Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (2) Luas Kawasan Kumuh (3) Nilai Sakip DPKP yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.528.907.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100,77 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 3 (tiga) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran “Meningkatnya akses rumah layak huni” dengan capaian kinerjanya 100,8 %.
2. Sasaran “Meningkatkannya kualitas prasarana dan sarana utilitas permukiman” dengan capaian kinerjanya 100 %.

3. Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdaerah” dengan capaian kinerjanya 101,5 %

Secara keseluruhan, capaian kinerja rata – rata dari 3 (tiga) indikator kinerja utama sebesar 100,77 % (kategori sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2024 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp.22.528.907.000 terealisasi Rp. 22.251.234.373 atau 98,77 %.

Disamping itu ditahun anggaran 2024 Disperkim Kabupaten Boyolali memperoleh Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,Penghargaan sebagai Kabupaten/kota layak Huni Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan

- Dalam pelaksanaan kegiatan relokasi (SPM) masyarakat terkendala penyediaan lahan.
- Kesadaran untuk pindah/relokasi masih perlu sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif.
- Dalam kegiatan peningkatan kualitas RTLH masyarakat terkendala kemampuan berswadaya.

2. Peluang/ Faktor Pendukung

- Sinergitas semua pihak dalam upaya mengurangi jumlah RTLH baik dari pemerintah pusat,provinsi,kabupaten maupun desa dan dari organisasi kemasyarakatan serta swasta.
- Kesadaran masyarakat dalam menerima program yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 325);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023,tentang Standart Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 60).

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perumahan terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan							Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3							
S2	3	2					5
S1/D4	5		2		2		9
D1-D3	2				1		3
SMA	4				2		6
SMP	0				1		1
SD	0				1		1
Jumlah	14	2	2		7		25

Tabel 1.2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d		
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
3	Pembina Tingkat I	IV/b	1	
4	Pembina	IV/a	4	
5	Penata Tingkat I	III/d	0	
6	Penata	III/c	1	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	1
8	Penata Muda	III/a	4	
9	Pengatur Tingkat I	II/d	2	
10	Pengatur	II/c	0	
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	
12	Pengatur Muda	II/a	0	

Tabel 1.2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	1	
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	3	
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	-	-
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	12	7
5	Jabatan Fungsional	2	

Aspek-aspek strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses rumah layak huni bagi Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas prasarana,sarana dan utilitas permukiman.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali adalah **“BOYOLALI MAJU, MELANJUTKAN PRO INVESTASI” *Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)***

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

1. Boyolali melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya;
3. Boyolali Kota susu, lumbung pangan Nasional;
4. Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
5. Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing.

Dari ke lima misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 5 yaitu **“Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing”** Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di wilayah kumuh dan diluar kawasan kumuh,fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan/ rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten dan fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana,sarana dan utilitas yang memadai.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, mengurangi Kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan jumlah prasana,sarana dan utilitas dalam kondisi baik.

Sasaran strategis dengan indikator sejumlah 3 dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 5 dan kegiatan sejumlah 13, keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 3 sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5 %	Bidang Perumahan
2	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	0,4 ha	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DISPERKIM	86,4	Sekretariat

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 22.528.907.000,-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2024. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ X 100%

- 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ X 100%

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara **target dan realisasi kinerja tahun ini**, antara **realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir**, **realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD**, dan apabila memungkinkan membandingkan antara **realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional**. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya akses rumah layak huni	93%	93,5 %	92,97 %	94,25 %	63,15 %
2.	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman	62,85	0,4 ha	31,72	0,4 Ha	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	86,40	85,65	86,4	87,70	-

3.2. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 3 sasaran dengan 3 Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya akses rumah layak huni

Tabel 3.2.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5%	94,25 %	100,8 %

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	
		2023	2024
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5%	92,97%	94,25 %

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93 %	94,25 %	101,34 %

Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional 2023	Realisasi Provinsi 2022	Keterangan
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	94,25 %	63,15 %	66,7 %	Realisasi tingkat Kabupaten Boyolali lebih tinggi dari capaian tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data 2023 dan 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja tahun 2024 pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,25 % dari target sebesar 93,5 % atau terealisasi sebesar 100,8 %.

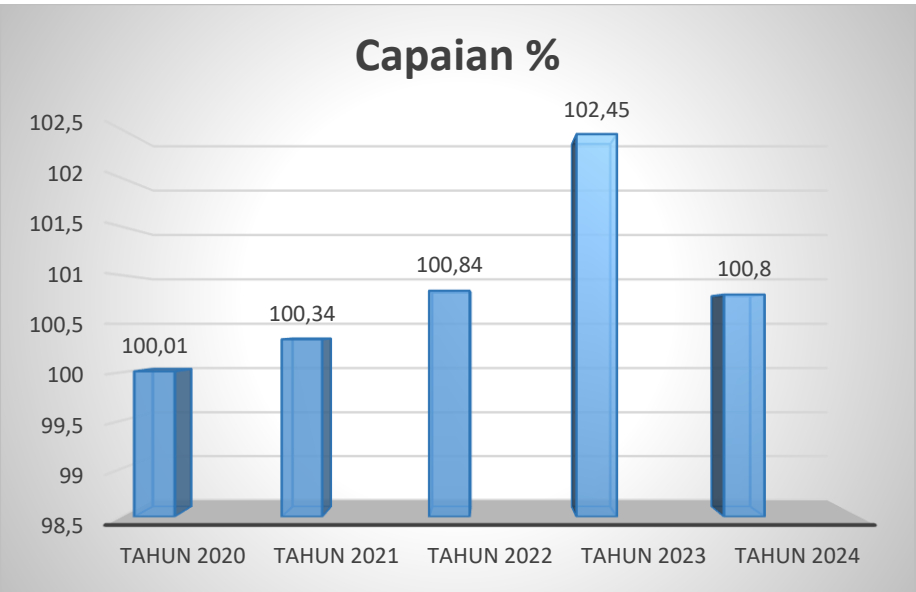
Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 93 %, maka target yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan, atau mengalami progres sebesar 101,34 % atau lebih besar 1,34 % dari target RPJMD di Tahun 2026.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian realisasi secara nasional yang dicapai oleh Kementrian PUPR maka Kabupaten Boyolali **lebih baik,karena capaian cakupan ketersediaan layak huni di tingkat nasional di Tahun 2023 baru tercapai 63,15 %** . Capaian Kinerja Kabupaten Boyolali juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan capain tingkat Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2022 Capaian di Tingkat Provinsi Baru mencapai 66,7 %. Target Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RPJMD maupun RENSTRA, karena capaian kinerja di Tahun 2023 realisasi capaiannya sudah hampir mendekati target RPJMD maupun RENSTRA.

Capaian realisasi kinerja di Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan karena didanai dari berbagai sumber dana: yaitu dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Boyolali, Baznas, PMI dan Dana Desa, serta dilaksanakan update data Rumah Tidak layak Huni dengan pemerintah desa/perangkat desa.

Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami **kenaikan**
Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2.1 grafik realisasi indikator kinerja utama dari tahun 2020 – 2024



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah sebagai berikut:

- 1) Sinergitas semua elemen pemerintahan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,pemerintah daerah kabupaten,organisasi sosial dan kemasyarakatan ,swasta serta pemerintah desa dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target tersebut.
- 2) SDM yang berkompeten dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan relokasi kendala yang ada adalah ketersediaan lahan dan kemampuan ekonomi masyarakat berswadaya.
- 2) Untuk kegiatan peningkatan RTLH kendala yang ada kemampuan berswadaya masyarakat rendah.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Untuk menyelesaikan kendala ketersediaan lahan Disperkim melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat serta untuk pembiayaannya bekerjasama dengan bank, sehingga masyarakat bisa membeli tanah untuk rumahnya dengan cara kredit.
- 2) Untuk menyelesaikan kendala kemampuan berswadaya masyarakat,Disperkim berkomunikasi dengan pemerintah desa,organisasi sosial kemasyarakatan, masyarakat dan keluarga penerima bantuan agar bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama meningkatkan akses rumah layak huni, dilaksanakan melalui 3 program,5 kegiatan dan 6 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2.5. Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 1.

No.	NAMA KEGIATAN		FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
			TARGET	REALISASI				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				486.500.000	413.636.600	72.863.400	89,17
	1	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			112.500.000	109.636.600	2.863.400	97,45
		1 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			112.500.000	109.636.600	2.863.400	97,45
		Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	1 Paket	1 Paket	100.000.000	99.078.600	921.400	99,08
		Belanja Jasa Tenaga Ahli (Apraisal Tanah)	1 Paket	1 Paket	12.500.000	10.558.000	1.942.000	84,46
	2	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			374.000.000	304.000.000	70.000.000	81,28
		2 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			374.000.000	304.000.000	70.000.000	81,28
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi - fasilitator	8 org bln	8 org bln	24.000.000	24.000.000	-	100,00
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8 Unit	8 Unit	350.000.000	280.000.000	70.000.000	80,00
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.506.360.000	2.459.879.000	106.481.000	95,85
	3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			100.000.000	98.007.000	1.993.000	98,01
		3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			100.000.000	98.007.000	1.993.000	98,01
		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (pelayanan)	1 Paket	1 Paket	50.000.000	48.701.000	1.299.000	97,40
		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (pemeliharaan aplikasi)	1 Paket	1 Paket	50.000.000	49.306.000	694.000	98,61
	4	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.406.360.000	2.301.872.000	104.488.000	95,66
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			509.360.000	474.872.000	34.488.000	93,23
		Pembangunan jalan banyudono	1 Paket	1 Paket	150.000.000	141.783.000	8.217.000	94,52

No.	NAMA KEGIATAN				FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
					TARGET	REALISASI				
				Pembangunan jalan bangsalan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	135.856.000	14.144.000	90,57
				Pembangunan jalan kemiri	1 Paket	1 Paket	150.000.000	149.003.000	997.000	99,34
				pengadaan komposbag	1 Paket	1 Paket	59.360.000	48.230.000	11.130.000	81,25
		4		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			756.000.000	756.000.000	-	100,00
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi - fasilitator	7 org bln	7 org bln	21.000.000	21.000.000	-	100,00
				Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	49 Unit	49 Unit	735.000.000	735.000.000	-	100,00
		5		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			1.141.000.000	1.071.000.000	70.000.000	93,87
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7 org bln	7 org bln	21.000.000	21.000.000	-	100,00
				Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	30 Unit	30 Unit	1.120.000.000	1.050.000.000	70.000.000	93,75
4				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
	5			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
		6		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha			15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi (APBD)	158 org bln	155 org bln	474.000.000	465.000.000	9.000.000	98,10
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Insentif Fiskal) 2 ORANG	2 org bln	2 org bln	6.000.000	6.000.000	-	100,00
				Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (APBD)	960 Unit	960 Unit	14.400.000.000	14.400.000.000	-	100,00
				Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Insentif Fiskal) 66 ORANG	66 Unit	66 Unit	990.000.000	990.000.000	-	100,00
							18.862.860.000	18.734.515.600	188.344.400	99

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali sebesar **Rp. 18.862.860.000** dan terealisasi **Rp. 18.734.515.600** dengan capaian **99 %**,**digunakan untuk peningkatan kualitas RTLH sebanyak 1.075 unit.** Disamping anggaran tersebut ada juga anggaran dari APBN melalui Program BPSB sebesar terealisasi 1 unit rumah dengan masing – masing unit memperoleh Rp.20.000.000, sedangkan dari Provinsi menyediakan anggaran bankeu langsung ke pemerintah desa untuk 364 unit dengan

masing – masing menerima Rp.20.000.000 dengan jumlah anggaran Rp. 7.280.000.000, dari dana desa untuk 68 unit dan dari Baznas memberikan bantuan sebanyak 117 Unit. Sehingga peningkatan kualitas RTLH tahun anggaran 2024 terealisasi 1.625 unit dari target 1.200 unit. Pembangunan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terealisasi 30 unit dari target 30 unit.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis.

Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan kantor, kendaraan operasional dan sarana lain. telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.3. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness

Tabel 3.3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian
Luasan Kawasan Kumuh	0,4 Ha	0,4 Ha	100 %

Tabel 3.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi 2022	
			2023	2024
Luasan Kawasan Kumuh	Kawasan	0,4 Ha	31,72 Ha	0,4 Ha

Tabel 3.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama		Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Luasan Kawasan Kumuh	Kawasan	62,85 Ha	0,4 Ha	349,8 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja tahun 2024 capaian penurunan kumuh nya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 31,32 Ha dari target sebesar 31,32 Ha atau terealisasi sebesar 100 %.Untuk Capaian Luasan Kawasan Permukiman Kumuh tidak bisa dibandingkan dengan tingkat Provinsi maupun Nasional, hal ini karena perbedaan kewenangan, yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh lebih dari 10 Ha dan samapai 15 Ha

penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Luasan Kumuh diatas 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat(Kementian PUPR).

Angka tersebut merupakan akumulasi dari capaian di tahun 2021 dimana luasan kumuh berkurang 14,74 Ha, capaian di tahun 2022 pengurangan kumuhnya seluas 8,92 Ha,capaian di tahun 2023 seluas 32,47 dan Capain di Tahun 2024 seluas 31,32 Ha. Jadi akumulasi pengurangan luasan kumuh sampai akhir 2024 seluas 87,45 Ha dari target 15 Ha, perhitungan ini sudah sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dan RENSTRA 2021-2026

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka target yang dicapai mengalami progres sebesar 349,8 %.

Target capaian pengurangan luasan kumuh Tahun 2024 ditetapkan sesuai kondisi riil capaian tahun sebelumnya,karena capaian kinerja pengurangan kawasan kumuh di akhir 2023 sudah mencapai 56,13 Ha atau capaian sudah melebihi target capaian akhir RPJMD 2026 yaitu pengurangan luasan kumuh seluas 25 Ha.

Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi capaian kinerja seperti terlihat dalam tabel.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3.1 : grafik realisasi indikator kinerja utama dari tahun 2021 – 2024



Jika diliat di grafik realisasi indikator,persentase capain semakin menurun,hal ini disebabkan target capain dibuat lebih tinggi, kalau sesuai RPJMD dan RENSTRA target kinerja tiap tahun penanganan kawasan permukiman kumuh hanya 5 Ha, sedangkan mulai tahun 2023 target kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh tiap tahun ditarget diatas 30 ha. Sehingga persentase capaian mendekati target kinerja yang ditetapkan.

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali yang memberikan prioritas pengurangan kawasan permukiman kumuh.
2. Kesadaran masyarakat dalam menerima program yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat baik.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama dilaksanakan melalui 2 program dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan

Tabel 3.3.5 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 2.

No.	NAMA KEGIATAN			FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISA SI KEUANG AN %
				TARGET	REALISASI				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					569.360.000	534.872.000	34.488.000	94
	1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				60.000.000	60.000.000	-	100,00
		1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			60.000.000	60.000.000	-	100,00
			belanja jasa tenaga administrasi	20 org bln	20 org bln	60.000.000	60.000.000	-	100,00
	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				509.360.000	474.872.000	34.488.000	93,23
		2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			509.360.000	474.872.000	34.488.000	93,23
			Pembangunan jalan banyudono	1 Paket	1 Paket	150.000.000	141.783.000	8.217.000	94,52
			Pembangunan jalan bangsalan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	135.856.000	14.144.000	90,57
			Pembangunan jalan kemiri	1 Paket	1 Paket	150.000.000	149.003.000	997.000	99,34
			pengadaan komposbag	1 Paket	1 Paket	59.360.000	48.230.000	11.130.000	81,25
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					190.000.000	188.519.000	1.481.000	99,22
	3	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				190.000.000	188.519.000	1.481.000	99,22
		3	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			40.000.000	39.582.000	418.000	98,96
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1 Paket	1 Paket	40.000.000	39.582.000	418.000	98,96
		4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			150.000.000	148.937.000	1.063.000	99,29
			Pembangunan PSU Desa Guwokajen	1 Paket	1 Paket	150.000.000	148.937.000	1.063.000	99,29
						759.360.000	723.391.000	35.969.000	95,26

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran dari APBD kabupaten Boyolali sebesar **Rp. 749.360.000 dan terealisasi Rp. 723.391.000 dengan capaian 95,26 %**.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan kantor,kendaraan operasional dan sarana lain. telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.4. Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Tabel 3.4.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Nilai Sakip	86,40	87,70	101,5

Tabel 3.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022 dan 2024	
		2023	2024
Nilai Sakip	86,40	85,70	87,70

Tabel 3.4.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Nilai Sakip	86,40	87,70	101,5 %

Tabel 3.4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Nilai Sakip Tertinggi Tingkat Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nilai SAKIP Tertinggi Kabupaten	Keterangan
Nilai Sakip	87,70	87,70	Realisasi capaian Nilai SAKIP Disperkim merupakan nilai SAKIP Tertinggi di Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja tahun 2024 capaian kinerja nya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,70 dari target sebesar 86,40 atau terealisasi sebesar 101,5 %

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka target yang dicapai mengalami progres sebesar 101,5 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian realisasi nilai SAKIP tertinggi OPD se Kabupaten Boyolali maka Nilai Disperskim menempati peringkat tertinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun untuk tahun ini mengalami kenaikan capaian kinerja Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

grafik 3.4.1 :realisasi indikator kinerja utama dari tahun 2020 – 2024



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali yang memberikan dukungan anggaran.
- 3. Sumber daya manusia yang memadai.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam pelaksanaan pencapaian target/kegiatan tidak ada kendala/ hambatan.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama dilaksanakan melalui 1 program dengan 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.5 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Sasaran 3.

No.	NAMA KEGIATAN		FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
			TARGET	REALISASI				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.216.047.000	3.129.660.023	86.386.977	97,31
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.452.331.000	2.439.110.135	13.220.865	99,46
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.271.227.000	2.258.006.135	13.220.865	99,42
		1 gaji pokok dan tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun	2.271.227.000	2.258.006.135	13.220.865	99,42
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			181.104.000	181.104.000	-	100,00

No.	NAMA KEGIATAN				FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
					TARGET	REALISASI				
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Administrasi)	12 Bulan	12 Bulan	77.616.000	77.616.000	-	100,00
			3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kebersihan)	12 Bulan	12 Bulan	51.744.000	51.744.000	-	100,00
			4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Penjaga malam)	12 Bulan	12 Bulan	51.744.000	51.744.000	-	100,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					356.826.000	310.666.080	46.159.920	87,06
			3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.868.800	4.637.000	231.800	95,24
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12 Bulan	12 Bulan	4.868.800	4.637.000	231.800	95,24
			4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.308.900	11.051.000	1.257.900	89,78
			6	belanja alat/bahan kegiatan kantor-perabot kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.308.900	11.051.000	1.257.900	89,78
			5	Penyediaan Bahan Logistik kantor			112.474.000	103.371.180	9.102.820	91,91
			7	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)	12 Bulan	12 Bulan	108.080.000	100.132.180	7.947.820	92,65
			8	belanja bahan isi tabung gas	12 Bulan	12 Bulan	2.294.000	2.294.000	-	100,00
			9	Belanja Bahan isi tabung pemadam kebakaran	3 Tabung	3 Tabung	2.100.000	945.000	1.155.000	45,00
			6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			20.800.000	19.740.900	1.059.100	94,91
			10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.950.000	14.949.900	100	100,00
			11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	5.850.000	4.791.000	1.059.000	81,90
			7	Penyediaan Bahan/Material			31.621.000	31.571.000	50.000	99,84
			12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.214.000	12.214.000	-	100,00
			13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	12 Bulan	14.518.000	14.468.000	50.000	99,66
			14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12 Bulan	12 Bulan	4.889.000	4.889.000	-	100,00
			8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			74.150.000	74.150.000	-	100,00
			15	belanja makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	64.250.000	64.250.000	-	100,00
			16	Belanja Natura dan Pakan Natura	12 Bulan	12 Bulan	9.900.000	9.900.000	-	100,00
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.603.300	66.145.000	34.458.300	65,75
			17	Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah/Luar Kota)	12 Bulan	12 Bulan	100.603.300	66.145.000	34.458.300	65,75

No.	NAMA KEGIATAN				FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
					TARGET	REALISASI				
			18	Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)			-	-	-	-
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					113.360.000	108.000.000	5.360.000	95,27
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				113.360.000	108.000.000	5.360.000	95,27
			19	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1 unit	1 unit	25.000.000	21.000.000	4.000.000	84,00
			20	Belanja modal alat penyimpanan (almari)	3 unit	3 unit	6.360.000	6.300.000	60.000	99,06
			21	Belanja modal alat penyimpanan (brankas)	1 unit	1 unit	7.500.000	6.800.000	700.000	90,67
			22	Belanja modal alat kantor lainnya (LCD Proyektor)	1 unit	1 unit	8.000.000	7.750.000	250.000	96,88
			23	Belanja modal alat kantor lainnya (Screen Proyektor)	1 unit	1 unit	2.500.000	2.450.000	50.000	98,00
			24	Belanja Modal Personal Komputer (Komputer all In 1)	1 unit	1 unit	15.000.000	15.000.000	-	100,00
			25	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop)	2 unit	2 unit	40.000.000	39.900.000	100.000	99,75
			26	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer Epson)	1 unit	1 unit	9.000.000	8.800.000	200.000	97,78
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.840.000	66.673.217	14.166.783	82,48
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.590.000	2.250.000	340.000	86,87
			27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12 Bulan	12 Bulan	1.700.000	1.700.000	-	100,00
			28	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2 buku	2 buku	890.000	550.000	340.000	61,80
			29	Belanja Paket/Pengiriman			-	-	-	-
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.250.000	54.460.967	13.789.033	79,80
			30	Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	250.000	15.293	234.707	6,12
			31	Belanja Tagihan Air	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	11.365.000	8.635.000	56,83
			32	Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	33.484.450	2.515.550	93,01
			33	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	9.596.224	2.403.776	79,97
		13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000	9.962.250	37.750	99,62
			34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 Paket	1 Paket	10.000.000	9.962.250	37.750	99,62
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					212.690.000	205.210.591	7.479.409	96,48
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.950.000	89.908.591	6.041.409	93,70

No.	NAMA KEGIATAN				FISIK		ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
					TARGET	REALISASI				
			35	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12 Unit	12 Unit	6.000.000	5.504.500	495.500	91,74
			36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -pajak	12 Unit	12 Unit	89.950.000	84.404.091	5.545.909	93,83
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.750.000	31.900.000	850.000	97,40
			37	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000	8.500.000	-	100,00
			38	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) LEMARI ES, AC	12 Bulan	12 Bulan	750.000	750.000	-	100,00
			39	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer , LAPTOP			16.000.000	15.650.000	350.000	97,81
			40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-PRINTER	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.000.000	500.000	93,33
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				83.990.000	83.402.000	588.000	99,30
			41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	83.990.000	83.402.000	588.000	99,30

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. **3.216.047.000** dan terealisasi Rp. **3.129.660.023** dengan capaian **97,31** %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan kantor,kendaraan operasional dan sarana lain, telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp. 22.251.234.373** atau **98,77** % dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 22.528.907.000** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 277.672.627** atau 1,23 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.1 Program dan Kegiatan Disperkim Tahun 2024

No.	NAMA KEGIATAN			ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.216.047.000	3.129.660.023	86.386.977	97,31
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.452.331.000	2.439.110.135	13.220.865	99,46
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.227.000	2.258.006.135	13.220.865	99,42
			1	gaji pokok dan tunjangan PNS	2.271.227.000	2.258.006.135	99,42
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	181.104.000	181.104.000	-	100,00
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Administrasi)	77.616.000	77.616.000	100,00
			3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kebersihan)	51.744.000	51.744.000	100,00
			4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Penjaga malam)	51.744.000	51.744.000	100,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		356.826.000	310.666.080	46.159.920	87,06
		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.868.800	4.637.000	231.800	95,24
			5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.868.800	4.637.000	95,24
		4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.308.900	11.051.000	1.257.900	89,78
			6	belanja alat/bahan kegiatan kantor-perabot kantor	12.308.900	11.051.000	89,78
		5	Penyediaan Bahan Logistik kantor	112.474.000	103.371.180	9.102.820	91,91
			7	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)	108.080.000	100.132.180	92,65
			8	belanja bahan isi tabung gas	2.294.000	2.294.000	100,00
			9	Belanja Bahan isi tabung pemadam kebakaran	2.100.000	945.000	45,00
		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.800.000	19.740.900	1.059.100	94,91
			10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.950.000	14.949.900	100
			11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.850.000	4.791.000	81,90
		7	Penyediaan Bahan/Material	31.621.000	31.571.000	50.000	99,84
			12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.214.000	12.214.000	100,00
			13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.518.000	14.468.000	99,66

No.	NAMA KEGIATAN				ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
			14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.889.000	4.889.000	-	100,00
		8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		74.150.000	74.150.000	-	100,00
			15	belanja makan minum rapat	64.250.000	64.250.000	-	100,00
			16	Belanja Natura dan Pakan Natura	9.900.000	9.900.000	-	100,00
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.603.300	66.145.000	34.458.300	65,75
			17	Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah/Luar Kota)	100.603.300	66.145.000	34.458.300	65,75
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			113.360.000	108.000.000	5.360.000	95,27
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		113.360.000	108.000.000	5.360.000	95,27
			19	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	25.000.000	21.000.000	4.000.000	84,00
			20	Belanja modal alat penyimpanan (almari)	6.360.000	6.300.000	60.000	99,06
			21	Belanja modal alat penyimpanan (brankas)	7.500.000	6.800.000	700.000	90,67
			22	Belanja modal alat kantor lainnya (LCD Proyektor)	8.000.000	7.750.000	250.000	96,88
			23	Belanja modal alat kantor lainnya (Screen Proyektor)	2.500.000	2.450.000	50.000	98,00
			24	Belanja Modal Personal Komputer (Komputer all In 1)	15.000.000	15.000.000	-	100,00
			25	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop)	40.000.000	39.900.000	100.000	99,75
			26	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer Epson)	9.000.000	8.800.000	200.000	97,78
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.840.000	66.673.217	14.166.783	82,48
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.590.000	2.250.000	340.000	86,87
			27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000	1.700.000	-	100,00
			28	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	890.000	550.000	340.000	61,80
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		68.250.000	54.460.967	13.789.033	79,80
			29	Belanja Tagihan Telepon	250.000	15.293	234.707	6,12
			30	Belanja Tagihan Air	20.000.000	11.365.000	8.635.000	56,83
			31	Belanja Tagihan Listrik	36.000.000	33.484.450	2.515.550	93,01

No.	NAMA KEGIATAN				ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
			32	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000	9.596.224	2.403.776	79,97
		13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000.000	9.962.250	37.750	99,62
			33	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000	9.962.250	37.750	99,62
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			212.690.000	205.210.591	7.479.409	96,48
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		95.950.000	89.908.591	6.041.409	93,70
			34	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000	5.504.500	495.500	91,74
			35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -pajak	89.950.000	84.404.091	5.545.909	93,83
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		32.750.000	31.900.000	850.000	97,40
			36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.500.000	8.500.000	-	100,00
			37	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) LEMARI ES, AC	750.000	750.000	-	100,00
			38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer , LAPTOP	16.000.000	15.650.000	350.000	97,81
			39	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-PRINTER	7.500.000	7.000.000	500.000	93,33
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		83.990.000	83.402.000	588.000	99,30
			40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	83.990.000	83.402.000	588.000	99,30
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				686.500.000	612.176.350	74.323.650	89,17
	6	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			112.500.000	109.636.600	2.863.400	97,45
		17	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		112.500.000	109.636.600	2.863.400	97,45
			41	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	100.000.000	99.078.600	921.400	99,08
			42	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Apraisal Tanah)	12.500.000	10.558.000	1.942.000	84,46
	7	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			374.000.000	304.000.000	70.000.000	81,28

No.	NAMA KEGIATAN			ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
		21	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	374.000.000	304.000.000	70.000.000	81,28
		43	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - fasilitator	24.000.000	24.000.000	-	100,00
		44	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	350.000.000	280.000.000	70.000.000	80,00
	8	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		200.000.000	198.539.750	1.460.250	99,27
		22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	200.000.000	198.539.750	1.460.250	99,27
		45	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000	99.500.000	500.000	99,50
		46	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000	99.039.750	960.250	99,04
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.566.360.000	2.459.879.000	106.481.000	95,85
	9	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		100.000.000	98.007.000	1.993.000	98,01
		23	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	98.007.000	1.993.000	98,01
		47	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (pelayanan)	50.000.000	48.701.000	1.299.000	97,40
		48	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (pemeliharaan aplikasi)	50.000.000	49.306.000	694.000	98,61
	10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		60.000.000	60.000.000	-	100,00
		24	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	60.000.000	60.000.000	-	100,00
		49	belanja jasa tenaga administrasi	60.000.000	60.000.000	-	100,00
	11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		2.406.360.000	2.301.872.000	104.488.000	95,66
		25	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	509.360.000	474.872.000	34.488.000	93,23
		50	Pembangunan jalan banyudono	150.000.000	141.783.000	8.217.000	94,52
		51	Pembangunan jalan bangsalan	150.000.000	135.856.000	14.144.000	90,57
		52	Pembangunan jalan kemiri	150.000.000	149.003.000	997.000	99,34
		54	pengadaan komposbag	59.360.000	48.230.000	11.130.000	81,25

No.	NAMA KEGIATAN			ANGGARAN (APBD) PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN - DESEMBER	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %
		26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	756.000.000	756.000.000	-	100,00
		55	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - fasilitator	21.000.000	21.000.000	-	100,00
		56	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	735.000.000	735.000.000	-	100,00
		27	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.141.000.000	1.071.000.000	70.000.000	93,87
		57	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000	21.000.000	-	100,00
		58	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.120.000.000	1.050.000.000	70.000.000	93,75
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
	12	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
		28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	15.870.000.000	15.861.000.000	9.000.000	99,94
		59	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (APBD)	474.000.000	465.000.000	9.000.000	98,10
		60	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Insentif Fiskal) 2 ORANG	6.000.000	6.000.000	-	100,00
		61	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (APBD)	14.400.000.000	14.400.000.000	-	100,00
		62	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Insentif Fiskal) 66 ORANG	990.000.000	990.000.000	-	100,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			190.000.000	188.519.000	1.481.000	99,22
	13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		190.000.000	188.519.000	1.481.000	99,22
		29	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	40.000.000	39.582.000	418.000	98,96
		63	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	40.000.000	39.582.000	418.000	98,96
		30	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	150.000.000	148.937.000	1.063.000	99,29
		54	Pembangunan PSU Desa Guwokajen	150.000.000	148.937.000	1.063.000	99,29
				22.528.907.000	22.251.234.373	277.672.627	98,77

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja (IKU) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Sasaran 1 “Meningkatkan akses rumah layak huni” dengan capaian kinerja 100,8 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 1 indikator yaitu Cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Sasaran 2 “meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness” dengan capaian kinerja 100 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 1 indikator yaitu Luasan Kawasan Kumuh.

Sasaran 3 “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah” dengan capaian kinerja 101,5 % dalam kateori Sangat Tinggi meliputi 1 indikator yaitu Nilai Sakip.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan peningkatan kemampuan SDM baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Peningkatan jumlah anggaran sehingga akan lebih banyak masyarakat yang terbantu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Untuk penyediaan rumah layak huni yang terjangkau akan lebih baik kalau pemerintah daerah melibatkan pihak swasta agar ikut membantu dengan memberikan anggaran seperti CSR agar rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat benar – benar dapat terwujud, khususnya bagi pegawai / ASN yang belum memiliki rumah.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 760/304/3/2024 tertanggal 4 Juni 2024 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023, sudah ditindaklanjuti berdasarkan surat Kepala Disperkim Kabupaten Boyolali Nomor :760/0826/4.4/2024, tanggal 1 Agustus 2024,perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023(surat terlampir),maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DISPERKIM Kab Boyolali Tahun 2023 yang diterima dari Inspektorat yaitu bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi informasi-informasi dalam laporan kinerja sehingga memberi pengaruh pada perubahan budaya kerja guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan.
2. Menampilkan Kendala/ hambatan yang ditemui dalam pencapaian target beserta upaya untuk mengatasinya dalam Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali belum melakukan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja Internal, namun Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sudah disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi Internal yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja OPD yang lebih baik.
Sudah dilakukan perubahan target kinerja dalam perjanjian kinerja Kepala Disperkim Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali dengan didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya, bukan berdasarkan RENSTRA OPD.
2. Kendala/hambatan yang ditemui dalam pencapaian target beserta Upaya untuk mengatasinya dalam Laporan Kinerja akan ditampilkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (kendala/hambatan sudah dimasukkan di Bab III Laporan LKjip 2024).

Boyolali, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



Jr. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303 199203 1 015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021-2026**

VISI : Boyolali Maju, Melanjutkan Pro Investasi
Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

MISI : Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Bidang Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	<p>Alasan : Menunjukkan tingkat penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan : $= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah se Kab. Boyolali}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	Bidang Perumahan
2	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman Berbasis Smartness	Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	<p>Alasan : Menunjukan tingkat penanganan kawasan kumuh sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan</p> <p>Formulasi Perhitungan : $= \frac{\text{Luasan kumuh yang ditangani}}{\text{Luasan kumuh sesuai Keputusan Bupati}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip DPKP	<p>Alasan : Menunjukan Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terutama dalam pengukuran kinerja</p> <p>Formulasi Perhitungan : Hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali</p>	Sekretariat



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2021
 TANGGAL: 31 Desember 2021

CASCADE INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	88,007	89	90	91	92	93	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	100	100	100	100	100	100	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah dokumen data rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten dan lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		1	1	1	1	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten	Jumlah dokumen data rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten		1	1	1	1	1
																									Identifikasi lahan-lahan perumahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen data lahan sebagai lokasi relokasi perumahan		-	-	1	-	-
																									Penyusunan site plan dan DED bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen site plan dan DED penanganan rumah korban bencana atau relokasi		-	-	-	1	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat korban bencana		25	25	25	25	25	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		20	20	20	20	20
																									Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		5	5	5	5	5
	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	88,007	89	90	91	92	93	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	100	100	100	100	100	100	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah rumah layak huni yang terfasilitas bagi masyarakat terdampak relokasi program Kabupaten		20	20	15	15	15	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan		20	20	15	15	15
																									Penysunan Site Plan dan /atau DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	Jumlah DED Rumah layak huni Korban bencana/relokasi		2	2	2	2	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																							Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Site Plan yang diterbitkan		24	24	24	24	24		
2	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	88,007	89	90	91	92	93	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	100	100	100	100	100	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Perumahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi dan Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman		2	2	2	2	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah aplikasi penerbitan izin perumahan		1	1	1	1	1	
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman		1	1	1	1	1		
																Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Jumlah Dokumen Permukiman Kumuh		4	3	3	3	3	Survey dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Jumlah Kecamatan yang didata kawasan Kumuhnya		4	4	4	4	4	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Luasan Kumuh yang tertangani		5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	Penyusunan Rencana tapak (site plan) dan DED peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Jumlah DED peningkatan kualitas kawasan kumuh		1	1	1	1	1	
																								Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/pe remajaan Permukiman Kumuh	Luasan kawasan kumuh yang tertangani		5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	
									Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh (Progam Kemiskinan)	100	100	100	100	100									Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya		1000 unit	1000 unit	1000 unit	1000 unit	1000 unit	
3									Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	100	100	100	100	100	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten	Jumlah rumah yang dapat dicegah dari kekumuhan		1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	Perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh kembangnya perukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya		1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
4	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	Luas Kawasan Kumuh	87,85	82,85	77,85	72,85	67,85	62,85	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penambahan kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam Kondisi baik		100	100	100	100	100	perencanaan penyelenggaraan psu perumahan	Jumlah DED PSU yang tersusun		100	100	100	100	100	
																											Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah penambahan fasilitas PSU di kawasan permukiman		100	100	100
																							Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU yang diserahkan dari Pengembang Ke Pemda		100	100	100	100	100		
									Program Kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	87,85 ha	5,7	1,1	1,7	2,2	2,8	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Perumahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi dan Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman		2	2	2	2	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah aplikasi penerbitan izin perumahan		1	1	1	1	1
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman		1	1	1	1	1		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Jumlah Dokumen Permukiman Kumuh		4	3	3	3	3	Survey dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Jumlah Kecamatan yang didata kawasan Kumuhnya		4	3	3	3	3	
																Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Luasan Kumuh yang tertangani		5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	Penyusunan Rencana tapak (site plan) dan DED peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Jumlah DED peningkatan kualitas kawasan kumuh		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
																								Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/pe remajaan Permukiman Kumuh	Luasan kawasan kumuh yang tertangani		5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	100	100	100	100	100									Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah layak huni bagi MBR dan Komunitas yang dibangun		300	300	300	300	300	
5	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip DPKP	79,56	80	80,5	81	81,5	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25 Dok	25 Dok	25 Dok	25 Dok	25 Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 D o k	1 o k	1 o k	1 o k	1 o k		
																							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 D o k	1 o k	1 o k	1 o k	1 o k		
																							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1 D o k	1 o k	1 o k	1 o k	1 o k		
																							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1 D o k	1 o k	1 o k	1 o k	1 o k		
																							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		1 D o k	1 o k	1 o k	1 o k	1 o k		
																							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4 D o k	4 o k	4 o k	4 o k	4 o k		
									Program Penunjang Urusan pemerintahan an Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah an yang terpenuhi sesuai standar	100	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Penganggar an Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS		1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk 14 kali dan TPP PNS untuk 12 kali		1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n	1 2 b u l a n

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kebutuhan Anggaran Honorarium 8 orang Tenaga Kontrak Non PNS untuk 1 tahun		12	12	12	12	12
																	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun		40	40	40	40	40	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun		15	15	15	15	15
																									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun		25	25	25	25	25
																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun		21	21	21	21	21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun		55	55	55	55	55
																									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dievaluasi dan dinilai kinerjanya		21	21	21	21	21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	12	12	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun		12	12	12	12	12
																									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah anggaran penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		12	12	12	12	12
																									Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	-
																									Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor		12	12	12	12	12
																									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	12	12	12	12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target									
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					
																						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar		365	365	365	365	365	b u a h	b u a h	b u a h	b u a h	b u a h			
																						Penyediaan bahan / Material	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor		12	12	12	12	12	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n			
																						Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan & minuman pegawai dan makanan & minuman rapat		12	12	12	12	12	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n			
																						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan perjalanan dinas		12	12	12	12	12	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n	b u l a n			
																Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			16	2	6	2	2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsip		600	600	600	600	600	D o k	D o k	D o k	D o k	D o k

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya		16	16	16	16	16	P a k e t		
																						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket kegiatan untuk penataan lingkungan gedung kantor		-	-	-	-	-			
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	12	12	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan anggaran pembelian buku cek, materai dan biaya transaksi keuangan untuk 1 tahun		12	12	12	12	12	b u l a n	
																						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah anggaran untuk penyediaan jasa telepon, air dan listrik selama 1 tahun		12	12	12	12	12	b u l a n		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2020	Target					Program	Indikator Program	Baseline 2020	Target					Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline 2020	Target					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Baseline 2020	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
																							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kerja kantor		12	12	12	12	12		
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara		7	7	7	7	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang wajib dibayar pajaknya		12	12	12	12	12		
																							Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1	1	1	1	1		

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



HENDRARTO SETYO WIBOWO

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91%	Bidang Perumahan
2.	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	72, 85 ha	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
3.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPKP	81	Sekretariat

Boyolali, Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI


Ir.CIPTO BUDOYO,MM,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015



PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir.CIPTO BUDOYO,MM,MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

Jabatan : Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali, Januari 2024

PIHAK KEDUA

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

PIHAK PERTAMA

Ir. CIPTO BUDOYO,MM,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5 %
2	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	4,97 ha
3	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP DPKP	85,9

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.071.187.000,00	
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.183.000.000,00	
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.230.000.000,00	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 14.796.000.000,00	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 190.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 21.470.187.000,00	

Boyolali, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI


K. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015

Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI


MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir.CIPTO BUDOYO,MM,MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH
Jabatan : Bupati Boyolali.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

Boyolali, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Ir.CIPTO BUDOYO,MM,MT

Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015

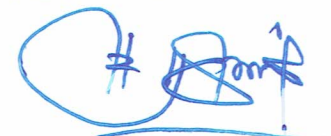
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5 %
2	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	0,4 ha
3	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP DPKP	86,4

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.216.047.000,00	
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 686.500.000,00	
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.566.360.000,00	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 15.870.000.000,00	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 190.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN		Rp. <u>22.528.907.000,00</u>	

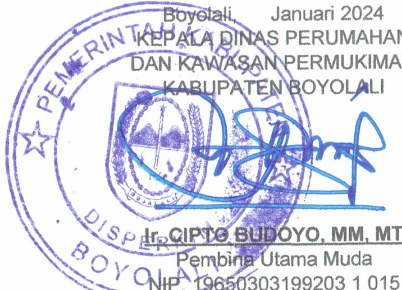
Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

Boyolali, Oktober 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI

Ir. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5%
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana(SPM)	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
		Persentase penyediaan rumah layak bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
		Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya dikawasan kumuh	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
		Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya diluar kawasan kumuh	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
2.	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	4,97ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97ha
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
		Presentase Penambahan PSU dalam Kondisi Baik	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP DPKP	85,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,90
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

Boyolali, Januari 2024
 KEPALA DINAS PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN BOYOLALI

Ir. CIPTO BUDOYO, MM, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650303199203 1 015

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 TRIWULAN I - IV

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JANUARI - MARET		APRIL - JUNI		JULI -SEPTEMBER		OKTOBER - DESEMBER		CAPAIAN S/D DESEMBER	ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN /FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]		[8]		[9]		[10]	[11]	[12]
1.	Meningkatnya akses rumah layak huni		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	94,25%	Tercapai, Faktor pendukung : Sinergitas semua pihak, tersedianya anggaran dan sarana, prasarana	-
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
2.	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness		Luasan Kawasan Kumuh	0,4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4 ha	Tercapai, Faktor pendukung : Sinergitas semua pihak, tersedianya anggaran dan sarana, prasarana	-
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penambahan PSU dalam kondisi baik	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		
3.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	86,4	-	-	-	-	-	-	-	-	87,70	Tercapai, Faktor pendukung : Sinergitas semua pihak, tersedianya anggaran dan sarana, prasarana	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%		

Boyolali, Januari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



Ir. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303199203 1 015

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Boyolali
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,5%	94,25%	100,8%
2	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	0,4 ha	0,4	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	86,4	87,70	101,5 %

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 22.528.907.000

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp. 22.251.234.373

Boyolali, Januari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI



Ir. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303199203 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Alun-Alun Lor Kragilan Mojosongo Boyolali 57323 Provinsi Jawa Tengah
Telp (0276) 320959 E-Mail : dpkp@boyolali.go.id

Boyolali, 1 Agustus 2024

Nomor : 760 / 0826 / 4.4 / 2024
Lampiran : 1(satu) bendel
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**
AKIP Tahun 2023.

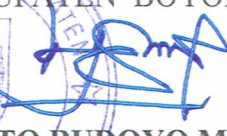
Kepada :
Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Boyolali
Di -

BOYOLALI

Berdasarkan Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 760/304/3/2024 tertanggal 4 Juni 2024 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023, dengan beberapa rekomendasi dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi informasi-informasi dalam laporan kinerja sehingga memberi pengaruh pada perubahan budaya kerja guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan
 - Tindak lanjut : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sudah disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi Internal yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja OPD yang lebih baik (dokumentasi terlampir).
 - Sudah dilakukan perubahan target kinerja dalam perjanjian kinerja Kepala Disperkim Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali dengan didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya, bukan berdasarkan RENSTRA OPD.
2. Menampilkan Kendala/ hambatan yang ditemui dalam pencapaian target beserta upaya untuk mengatasinya dalam Laporan Kinerja.
 - Tindak lanjut : Kendala/hambatan yang ditemui dalam pencapaian target beserta Upaya untuk mengatasinya dalam Laporan Kinerja akan ditampilkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Demikian laporan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 untuk menjadikan perhatian dan maklum adanya.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI

Ir. CIPTO BUDOYO, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196503031992031015

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

SERTIFIKAT

Nomor : 002.5/0006003

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 002.5/54 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Layak Huni Tahun 2024.

Diberikan kepada :

KABUPATEN BOYOLALI

sebagai :

KABUPATEN/KOTA LAYAK HUNI TAHUN 2024

Semarang, 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SUMARNO, S.E., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001